KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR siap sahkan anggaran penanggulangan banjir
Tanggal : Kamis, 30 Januari 2014
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 2

DPR Siap Sahkan Anggaran Penanggulangan Banjir

BURT Kunjungi Titik Banjir di Jakarta

JAKARTA – Banjir yang selalu menjadi problem besar di Ibu Kota Jakarta, ikut menjadi perhatian Badan Urusan Tumah Tangga (BURT) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Sebagai wujud kepedualian atas bencana banjir itu, lembaga yang menjadi alat kelengkapan DPR ini mengunjungi wilayah-wilayah banjir dan memberi bantuan kepada pengungsi korban banjir.

Dalam kunjungannya pada korban banjir, di Kelurahan Rawa Jati, Kali Bata, Jakarta Selatan, anggota BURT Refrizal mengatakan DPR akan mendukung penuh penanggulan banjir di Jakarta, asalkan pemerintah pusat maupun pemprovnya sendiri bisa memberikan rencana yang strategis dan ampuh dalam menanggulangi banjir.

Tidak hanya itu, lanjutnya, pemerintah pun harus berani dan konsiten dalam menjalankannya. "Sebetulnya selama ini sudah banyak rencana dikembangkan tapi tidak ada satupun yang diekesekusi secara konsisten. Itu salahsatu persoalannya. Sudah banyak rencana tapi tidak pernah konsisten dilakukan. Yang ada baru ribut setelah banjir, baru rame setelah ada korban, cara seperti ini kan tidak bisa dibiarkan berlanjut," tegasnya.

Refrizal mengaku akan mendukung sepenuhnya apapun langkah pemerintah asal konkrit dan bukan hanya wacana-wacana atau diskusi penanggulan banjir yang ramai digelar justru pada saat ada bencana, kemudian diam ketika bencana surut. "Harus diingat bahwa kerugian setiap bencana banjir itu bukan hanya materi tapi juga immaterial. Energi rakyat ini juga habis hanya untuk menghadapi dan menangani banjir," tandasnya.

Pemerintah, menurutnya, harus bisa dan segera menyiapkan *blue print* penangangan banjir yang benar-benar bisa menanggulangi banjir dan DPR sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi *budgeting* akan mendukung pengesahan anggarannya. "Selama ini bangsa Indonesia dirugikan triliunan rupiah akibat banjir di Ibukota sehingga daripada uang hilang percuma karena banjir lebih baik digunakan untuk menangani banjir," papar politisi PKS ini.

Belum lagi, lanjutnya, kerugian sampingan akibat banjir seperti biaya hidup menjadi lebih tinggi karena harga kebutuhan pokok naik, biaya pengobatan, renovasi rumah masyarakat, renovasi sarana dan prasarana, mahalnya biaya ekonomi, biaya sosial dan lain sebagainya. Ini jumlahnya besar sekali. Karena itu, dia mendesak pemerintah pusat mengkoordinasikan pelaksanaan rencana yang terintegrasi dengan pemda dan pemprov.

"Syaratnya, kepala pemerintahan baik pusat maupun daerah harus meninggalkan kepentingan-kepentingan politik untuk bekerja sama berupaya membuat langkah pencegahannya. Pemerintah pusat maupun daerah jangan selalu beralasan tidak ada anggarannya," katanya.

Menurutnya, banyak anggaran di pusat maupun daerah yang tidak terserap selama ini. Anggaran yang biasanya diletakkan di deposito itu harus dihabiskan untuk digunakan kepentingan rakyat. "Jangan menyalahkan pihak lain dan jangan hanya banyak bicara," jelasnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua BURT asal Partai Demokrat, Ajeng Ratna Suminar, mengatakan untuk mengatasi banjir salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan menormalisasi sungai-sungai yang ada di Jakarta. Fungsi sungai dan kondisi menurutnya minimal harus dipertahankan seperti awalnya kalau tidak bisa dibuat lebih baik..

"Normalisasi sungai di Jakarta bahkan menurut saya lebih mudah. Masyarakat korban banjir yang menghuni bantaran kali terutama semuanya mau dipindahkan. Mereka sudah jenuh dengan banjir. Jadi jangan menggunakan alasan sulit memindahkan mereka karena mereka menolak dipindahkan. Mereka mau dipindahkan kok ke rumah susun. Kalau di daerah sulit, mereka menolak dipindahkan ke rumah susun karena terbiasa dengan lahan yang besar. Warga Jakarta lebih terbiasa hidup di rumah susun yang mungil," jelasnya.

Dia pun mengharapkan agar segera dibangun rumah-rumah susun untuk menampung masyarakat yang menghuni pinggiran sungai. Jika rumah susun itu sudah selesai dibangun maka jangan lagi dibiarkan kosong, tapi langsung dihuni."Yah kalau sudah terbangun jangan lagi kosong, harus langsung diisi," tegas politisi perempuan berjilbab ini.

Lebih lanjut, dia mengharapkan langkah-langkah penangangan banjir bisa segera bisa direalisasikan."Dulu Belada membangun berbagi bendungan, waduk dan sungai. Sekarang jaman merdeka, jangankan membangun, memelihara apa yang sudah dibangun Belanda saja kita tidak bisa. Kita harus malu sebenarnya," ujarnya.

Sekarang ini, menurutnya, tidak ada alasan bahwa banjir di Jakarta tidak bisa ditangani. Padahal ini hanya persoalan kemauan saja. Dicontohkan, dulu Singapura itu juga berantakan, tapi mereka bisa merapikannya. "Tidak ada kata tidak mungkin untuk menangani masalah asal ada kemauan untuk mencarikan solusinya. Jadi kita di parlemen akan mengawasi kinerja kementerian terkait dan siap mengesahkan anggaran yang akan difungsikan untuk penanggulan banjir secara menyeluruh," paparnya.

Sementara itu, Ketua DPR RI, Marzuki Alie mengatakan penangangan banjir harus sistematis dan tidak hanya ditangani secara symtomatis seperti yang selama ini terjadi. Berbagai penyebab banjir dan kondisi kekinian harus dipetakan dari hulunya sampai hilir. Selanjutnya, baru kemudian berdasarkan hitung-hitungan dibuat solusinya dan dijalankan secara konsisten.

"Maksudnya, pertama, harus diukur dulu berapa kemampuan sungai mengalirkan air, berapa debit air yang dialirkan rata-rata, berapa tinggi curah hujannya. Kemudian dipetakan berapa kemampuan serap tanah, kemampuan sungai dan waduk dalam mengalirkan dan menampung air," ujar Marzuki kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/1).

Setelah itu, menurut Marzuki, baru dihitung biayanya dan dicarikan untuk kemudian dieksekusi secara konsisten solusi penangangannya. "Yang pertama tentunya mengembalikkan fungsi sungai. Kalau masih tidak mencukupi baru dibangun wadu-waduk penampung air sebagai penampung air untuk diarahkan ke laut.Bendungan pun harus dibangun agar bisa diatur debit airnya," jelasnya.

Penangangan banjir tidak bisa dilakukan hanya dengan bicara dan tampil di publik di daerah-darah banjir. Penanganan banjir harus dengan pengambilan kebijakan yang komprehensif dan konsisten dilaksanakan."Ini logika saja dan jelas hitung-hitungannya kok, yang penting konsisten dilaksanakan karena memang tidak ada cara lain," pungkasnya. **(dms)**